



## Abstrak

Perubahan-perubahan struktur politik yang terjadi setelah kejatuhan Suharto telah mendorong gerakan buruh untuk memanfaatkan peluang-peluang politik yang muncul dengan terlibat dalam politik elektoral. Jejak-jejak keterlibatan elemen-elemen gerakan buruh bahkan telah tercatat sejak pemilu pertama masa reformasi hingga pemilu 2019 yang baru lalu, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Sayangnya, meskipun jumlah pekerja di Indonesia terhitung sangat besar dalam struktur penduduk di Indonesia, namun keunggulan tersebut belum berhasil mengantarkan gerakan buruh sebagai pemenang dalam politik elektoral. Menariknya, di balik kegagalan tersebut, buruh telah menunjukkan kapasitas mobilisasi yang luar biasa yang menjadi penyebab keberhasilan buruh dalam ranah kebijakan dengan lahirnya beberapa peraturan perundangan yang menguntungkan buruh.

Dalam perspektif teori proses politik, keberadaan peluang politik menjadi faktor penentu keberhasilan suatu gerakan sosial. Namun keberadaan peluang-peluang politik pasca kejatuhan Suharto ternyata tidak berhasil memberikan keberhasilan kepada gerakan buruh dalam politik elektoral. Oleh karena itu diperlukan perspektif teori gerakan sosial lain untuk menjawab persoalan tersebut, yaitu teori mobilisasi sumber daya. Dalam teori mobilisasi sumber daya, struktur mobilisasi menjadi faktor determinan bagi keberhasilan gerakan buruh. Nyatanya, kapasitas mobilisasi yang ditunjukkan buruh gagal memberikan kemenangan dalam politik elektoral. Oleh karena itu, disini dibutuhkan perspektif teori lain untuk menjawab mengapa kapasitas mobilisasi gerakan dalam ranah kebijakan gagal direproduksi pada ranah elektoral. Di sinilah peran *framing* yang berasal dari teori *New Social Movement* diharapkan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, disertasi ini mencoba menawarkan pendekatan integratif teori-teori gerakan sosial dalam menjawab kegagalan suatu gerakan sosial, yang dalam konteks disertasi ini direfleksikan oleh kegagalan gerakan buruh dalam politik elektoral di Indonesia. Kegagalan *framing* gerakan buruh menyebabkan kapasitas mobilisasi politik elektoral buruh rendah, sehingga bermuara pada kegagalan gerakan memanfaatkan peluang-peluang politik.

Data-data riset ini diperoleh melalui *field research* selama kurang lebih satu tahun yang diawali pada bulan Maret 2018 hingga menjelang pemilu 2019 di tiga provinsi yang merupakan *epicentrum* gerakan buruh di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Penelitian dilakukan dengan mendatangi kantor-kantor pusat konfederasi yang paling aktif berpolitik maupun yang tidak terlibat dalam politik elektoral yang semuanya berlokasi di DKI Jakarta. Penulis bertemu serta mewawancarai beberapa pimpinan organisasi baik pada level konfederasi maupun federasi-federasi serikat anggota dari konfederasi tersebut. Selain itu, beberapa data diperoleh dengan mewawancarai beberapa pimpinan organisasi buruh di tingkat daerah di ketiga provinsi tersebut di atas yang di daerahnya banyak menjadi arena pertarungan para kandidat buruh. Selain mewawancarai pihak-pihak internal gerakan sebagaimana penulis uraikan di atas, penulis juga mewawancarai beberapa pejabat Kementerian Ketenagakerjaan serta beberapa pengamat perburuhan, kalangan pers, maupun LSM perburuhan yang penulis anggap memiliki informasi terkait dinamika perkembangan gerakan buruh dalam politik elektoral. Data-data dokumenter dalam jumlah besar juga penulis pergunakan dalam riset ini, baik dari organisasi-organisasi buruh, kementerian ketenagakerjaan, maupun KPU. Demikian juga penulis memanfaatkan data-data sekunder yang terdapat dalam banyak jurnal, buku, artikel, dan beberapa terbitan internal gerakan. Data-data dari website media *online* juga sangat membantu penulis dalam mengumpulkan informasi terkait riset ini.



Melalui penggunaan teori *political process*, disertasi ini menemukan, bahwa peluang-peluang politik yang muncul pada awal reformasi gagal membawa keberhasilan bagi keterlibatan gerakan buruh dalam politik elektoral karena sifat dualitas dari perubahan tersebut. Pada satu sisi, peluang politik memungkinkan buruh terlibat dalam berbagai pemilu namun pada sisi lain, perubahan tersebut membawa serta masuknya kekuatan globalisasi yang menghambat kapasitas mobilisasi gerakan buruh, terutama akibat berlakunya rezim *flexibility labor market*. Melalui penggunaan teori mobilisasi sumber daya (RMT), disertasi ini menemukan bahwa fragmentasi menjadi hambatan terbesar bagi gerakan buruh dalam memobilisasi sumber daya yang dimilikinya untuk memenangkan kandidat-kandidat buruh. Sementara melalui penggunaan teori NSM, disertasi ini menemukan bahwa kegagalan mobilisasi dalam politik elektoral disebabkan gerakan buruh gagal menciptakan *framing* yang mampu memposisikan keterlibatan buruh dalam politik elektoral sebagai kebutuhan bersama dari seluruh elemen gerakan buruh.

Kontribusi yang diharapkan dapat diberikan oleh penulis dari disertasi ke dalam khazanah perkembangan ilmu sosial adalah *pertama*, penempatan faktor internasional berupa globalisasi neo-liberal ke dalam konteks perubahan struktur politik sehingga peluang yang muncul tidak selalu membawa keuntungan bagi gerakan buruh. *Kedua*, penempatan *political linkage* sebagai salah satu faktor penting dalam menghambat kapasitas mobilisasi gerakan buruh dalam politik elektoral karena memunculkan *distrust* dari sebagian kalangan buruh terhadap buruh berpolitik, dan *ketiga*, disertasi ini berkontribusi terhadap kajian kegagalan gerakan buruh dalam politik elektoral dalam hal menempatkan *framing* sebagai jawaban atas kegagalan untuk membawa kapasitas mobilisasi dalam ranah kebijakan ke dalam ranah elektoral.

Terhadap teori *political process*, disertasi ini berkontribusi dalam hal menunjukkan bahwa peluang politik bukan sesuatu yang bersifat *given*, akan tetapi dia diciptakan dengan memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki gerakan meskipun sifatnya sangat terbatas. Terhadap teori mobilisasi sumber daya, disertasi ini berkontribusi pada aspek historis sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas mobilisasi sumber daya, sementara terhadap teori NSM, disertasi ini berkontribusi dalam hal penempatan infrastruktur komunikasi organisasi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses pembingkai atau *framing* dari suatu gerakan. Dengan demikian, disertasi ini menunjukkan ada hubungan antar faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial. *Pertama*, ada hubungan yang bersifat timbal balik antara struktur peluang politik dengan mobilisasi sumberdaya; *Kedua*, ada hubungan yang bersifat timbal balik antara kapasitas mobilisasi dengan keberhasilan proses *framing*; dan *ketiga*, ada hubungan timbal balik antara proses *framing* dengan struktur peluang politik.



## Abstracts

The changes in the political structure that occurred after the fall of Suharto have encouraged the labor movement to take advantage of the political opportunities that have arisen by engaging in electoral politics. Traces of the involvement of elements of the labor movement have even been recorded since the first elections in the reform period to the last 2019 elections, both in the legislative and executive elections. Unfortunately, although the number of workers in Indonesia is considered very large in the population structure in Indonesia, this advantage has not succeeded in delivering the labor movement as a winner in electoral politics. Interestingly, behind this failure, workers have shown extraordinary mobilization capacity which is the cause of the success of workers in the realm of policy with the birth of several laws and regulations that benefit workers.

In the perspective of political process theory, the existence of political opportunities is a determining factor for the success of a social movement. However, the existence of political opportunities after the fall of Suharto proved unsuccessful in bringing success to the labor movement in electoral politics. Therefore, another social movement theory perspective is needed to answer this problem, namely the theory of resource mobilization. In resource mobilization theory, the structure of the mobilization becomes a determinant factor for the success of the labor movement. In fact, the capacity for mobilization shown by the workers failed to bring victory in electoral politics. Therefore, another theoretical perspective is needed here to answer why the capacity of movement mobilization in the policy domain fails to be reproduced in the electoral realm. This is where the role of framing which comes from the theory of the New Social Movement is expected to be able to answer these questions. Thus, this dissertation tries to offer an integrative approach to social movement theories in responding to the failure of a social movement, which in the context of this dissertation is reflected by the failure of the labor movement in electoral politics in Indonesia. The failure of the framing of the labor movement has resulted in low labor electoral political mobilization capacity, thus leading to the failure of the movement to take advantage of political opportunities.

This research data was obtained through field research for approximately one year starting in March 2018 until the 2019 elections in three provinces which are the epicenter of the labor movement in Indonesia, namely DKI Jakarta, West Java and Banten. The research was conducted by visiting the head offices of the confederations that were most politically active and who were not involved in electoral politics, all of which were located in DKI Jakarta. The author met and interviewed several organizational leaders at both the confederation level and the member union federations of the confederation. In addition, some data were obtained by interviewing several leaders of labor organizations at the regional level in the three provinces mentioned above, which in many regions are the battle arenas for labor candidates. In addition to interviewing internal parties of the movement as described above, the author also interviewed several Ministry of Manpower officials as well as labor observers, the press, and labor NGOs whom the author deems to have information related to the dynamics of the development of the labor movement in electoral politics. The authors also use large amounts of documentary data in this research, both from labor organizations, the ministry of manpower, and the KPU. Likewise, the author uses secondary data found in many



journals, books, articles, and several internal publications of the movement. Data from online media websites are also very helpful for the author in gathering information related to this research.

By using political process theory, this dissertation finds that the political opportunities that emerged at the beginning of the reformation failed to bring success to the involvement of the labor movement in electoral politics because of the dual nature of these changes. On the one hand, political opportunities allow workers to be involved in various elections but on the other hand, these changes bring with them the entry of globalization forces that hinder the mobilization capacity of the labor movement, especially due to the enactment of the labor market flexibility regime. Through the use of resource mobilization theory (RMT), this dissertation finds that fragmentation is the biggest obstacle for the labor movement in mobilizing its resources to win labor candidates. Meanwhile, through the use of NSM theory, this dissertation finds that the failure of mobilization in electoral politics is due to the labor movement failing to create a framing that is able to position workers' involvement in electoral politics as a common need of all elements of the labor movement.

The contribution that the writer hopes to make from the dissertation to the realm of social science development is first, the placement of international factors in the form of neo-liberal globalization into the context of changing political structures so that the opportunities that arise do not always bring benefits to the labor movement. Second, the placement of political linkage as an important factor in hampering the capacity of mobilizing the labor movement in electoral politics because it raises distrust from some workers to political workers, and third, this dissertation contributes to the study of the failure of the labor movement in electoral politics in terms of placing framing as an answer. for the failure to bring mobilizing capacities in the policy sphere into the electoral realm.

To the political process theory, this dissertation contributes in terms of showing that political opportunity is not something that is given, but it is created by mobilizing the resources owned by the movement even though it is very limited in nature. Regarding the theory of resource mobilization, this dissertation contributes to the historical aspect as a factor affecting the capacity of resource mobilization, while for NSM theory, this dissertation contributes to the placement of organizational communication infrastructure as a factor affecting the success or failure of the framing process of a movement. . Thus, this dissertation shows that there is a relationship between the factors that influence the success or failure of social movements. First, there is a reciprocal relationship between political opportunity structures and resource mobilization; Second, there is a reciprocal relationship between capacity mobilization and the success of the framing process; and third, there is a reciprocal relationship between the framing process and the structure of political opportunity.